BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan atau transaksi jual beli merupakan praktik yang sudah lama berkembang seiring dengan kehidupan manusia beserta dinamikanya. Transaksi terjadi seiring dengan kebutuhan manusia terhadap harta untuk memenuhi hajat hidup mereka. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, maka digariskan norma dan aturan agar tercipta sebuah transaksi yang harmonis. Norma atau aturan tersebut bisa saja digariskan oleh pemerintah dalam sebuah aturan hukum, dan juga bisa saja digariskan oleh agama yang diyakini oleh pemeluknya. Dalam konteks ini, aturan agama tersebut tidak hanya menjadi rambu dalam transaksi, namun sudah menjadi sebuah keyakinan yang dipercayai berdampak terhadap tidak sahnya sebuah transaksi dan berdosa bagi pelanggarnya dan juga sah serta berpahala bagi yang melaksanakan sesuai dengan aturan agama tersebut.

Islam dalam hal ini bukan hanya sebuah keyakinan saja, namun Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai sebuah agama yang mengajarkan jalan hidup (*way of life*), jalan hidup duniawi dan ukhrawi. Dalam hal kehidupan duniawi, khususnya bermuamalat, Islam menggariskan norma yang jelas dengan memberikan aturan yang umum, seiring

dengan dinamika masyarakatnya. Masyarakat boleh saja membuat aturan atau syarat-syarat jual beli sebagai wujud kebebasan berkehendak selama tidak bertentangan dengan garis syarak yang baku. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا ابو عامر العقدي حدثنا
كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني عن ابيه عن جده أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا
أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل
حراما. هذا حديث حسم صحيح¹

Rasulullah saw bersabda perdamaian itu boleh antara sesama manusia, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Seorang muslim selalu dihubungkan dengan persyaratan, kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.

Dengan demikian, walaupun hukum Islam tidak merinci secara tegas hukum muamalah sebagaimana dalam konteks hukum ibadah, namun justru memberikan kemudahan dan kemaslahatan karena hukum akan bergerak dinamis sesuai dengan kedinamisan masyarakatnya. Salah satu hasil bentuk

¹ Abi Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Tsaurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz II, (Indonesia: Maktabah Dahlan), t.th., hlm. 403.

dari sifat dinamis itu adalah bahwa dalam hukum Islam (baca fikih), banyak terdapat variasi pendapat ulama mazhab yang memperkaya khazanah hukum Islam itu sendiri, dan tentu saja memberikan kemudahan untuk menentukan hukum dari sebuah transaksi.

Masyarakat Banjar menurut para pakar, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmadi Hasan, selalu diidentikkan dengan Islam. Secara sosiologis, keidentikkan masyarakat Banjar dengan Islam menunjukkan kepada identitas sosial yang merefleksikan suatu dasar ikatan sosial yang sama. Secara historis, Islam dijadikan sebagai sebuah sistem pegangan oleh masyarakat Banjar. Ini berarti bahwa perilaku orang Banjar dapat dicarikan sumbernya pada referensi Islam, termasuk di dalamnya adalah perilaku orang Banjar dalam bertransaksi jual beli.² Lebih lanjut Ahmad Hasan menjelaskan bahwa orang Banjar adalah penganut Mazhab Syafi'i yang fanatic dan terefleksi dalam seluruh aspek kehidupan orang Banjar. Kefanatikan itu juga terdapat dalam adat dagang. Orang Banjar sangat berpegang teguh dengan ajaran Syafi'i. Mazhab ini dapat dikatakan sudah mengkristal dan merupakan adat yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan orang Banjar.³

² Lihat Ahmadi Hasan, "Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan" dalam *Jurnal Ahkam* Vol XIV No. 2 Juli 2014, hlm. 228-229.

³ *Ibid.*

Menurutnya lagi bahwa adat dagang orang Banjar yang fanatik terhadap mazhab Syafi'i dapat dilihat bagaimana mereka memaknai akad sebagai sesuatu yang sangat signifikan. Bagi orang Banjar tidak sah suatu transaksi jual beli atau kegiatan dagang kalau akad tidak dilakukan dengan cara sempurna, yaitu dengan mengucapkan lafadz sesuai dengan harga dan barang yang diperjualbelikan. Namun dalam transaksi jual beli modern seperti sekarang ini, ketika mereka berbelanja ke *mall* atau pasar swalayan, transaksi seperti itu sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, transaksi di pasar modern tersebut dianggap sudah mempraktikkan mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa konsep "*an taradhin*" sudah terpenuhi ketika orang memilih barang.⁴

Beranjak dari problematika tersebut di atas, ada dua persoalan yang mesti dilakukan dengan penelitian lebih lanjut yaitu pertama secara empirik, bagaimanakah pendapat ulama tentang transaksi tersebut, apakah sah atautidak. Kedua, secara normatif dan teoritik apakah transaksi yang dilakukan sebagaimana di pasar modern seperti *mall* dan swalayan tersebut sudah keluar dari mazhab Syafi'i, atautidak justru masih dalam ruang lingkup mazhab Syafi'i. Ulama yang ada di Kalimantan Selatan menjadi sentral dalam penelitian ini dikarenakan peran ulama yang signifikan dalam kehidupan

⁴ *Ibid.*

masyarakat. Hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat Islam sangat terkait dengan eksistensi ulama sejak pertama kali belajar tentang doktrin-doktrin keimanan sampai dengan peletakkan nilai-nilai agama Islam dalam setiap kehidupan mereka.⁵ Dalam masyarakat Banjar, eksistensi ulama di tengah-tengah kehidupan mereka sangat penting. Ulama menjadi rujukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan, termasuk tempat untuk bertanya hukum bahkan sampai kepada memberikan air penawar bagi yang meminta.

Berdasarkan persoalan di atas, dan peran penting ulama dalam kehidupan masyarakat Banjar, maka proposal penelitian ini diberi judul **“SHIGAT IJAB KABUL TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ULAMA KALIMANTAN SELATAN (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dalam latar belakang di atas, maka rencana penelitian ini akan difokuskan kepada dua hal yaitu pertama, bagaimanakah persepsi ulama tentang praktik transaksi jual beli tersebut. Kedua, apakah transaksi yang biasa dilakukan masyarakat Banjar dewasa ini sudah keluar

⁵ Horiko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Terjemahan Umar Basalim, dan Andi Muary Surawwa, (Jakarta: P3M), 1987, hlm. 149.

dari mazhab Syafi'i ataukah masih dalam ruang lingkup mazhab tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan kepada dua hal yaitu pertama mengetahui bagaimanakah persepsi ulama tentang praktik transaksi jual beli tersebut. Kedua, mengetahui apakah secara normatif dan teoritik, transaksi yang biasa dilakukan masyarakat Banjar dewasa ini sudah keluar dari mazhab Syafi'i ataukah masih dalam ruang lingkup mazhab tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Dewasa ini transaksi jual beli semakin berkembang dan sangat berbeda jauh dengan transaksi jual beli yang dilakukan dulu, seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi manusia. Pergeseran nilai-nilai hukum sangat memungkinkan terjadi, termasuk di antaranya adalah tentang penggunaan lafadz ijab dan kabul dalam sebuah transaksi jual beli. Syafi'iyah sebagai mazhab yang dianut secara mayoritas oleh masyarakat Banjar sering dikatakan bahwa tidak membenarkan transaksi jual beli dengan tidak menggunakan lafadz ijab dan kabul sebagaimana yang disampaikan pada bagian terdahulu. Namun faktanya bahwa masyarakat sekarang tidak hanya bertransaksi secara tradisional, namun juga bertransaksi di pasar-pasar modern yang lazim tidak menggunakan pengucapan ijab dan kabul. Oleh karena itu,

penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan kemanfaatan yaitu pertama, secara akademik, hasil penelitian ini bisa menambah khazanah keilmuan syariah. Kedua, bahwa secara teortik akan membuktikan sebuah anggapan apakah praktik yang dilakukan masyarakat Banjar pada umumnya sekarang ini masih dalam lingkup mazhab Syafi'i ataukah sudah berada di luar Syafi'iyah. Secara praktis hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi referensi tentang bertransaksi jual beli dengan shigat akad jual beli yang sesuai dengan mazhab fikih yang dipercayai.

E. Batasan Istilah

Ada beberapa batasan istilah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Shigat Ijab dan Kabul. Ijab adalah ungkapan yang keluar lebih dahulu dari dan ke salah satu dari dua pihak. Sedangkan Kabul adalah ungkapan kedua yang keluar.⁶ Dengan demikian yang dimaksudkan dalam penelitian ini dengan shigat ijab kabul adalah sebuah ungkapan yang muncul dari dua pihak yang bertransaksi sebagai wujud dari shigat akad yang merupakan salah satu rukun dari sebuah akad yang terjadi, dan dalam konteks ini adalah shigat akad jual beli.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby), t.th, jilid III, hlm. 48.

2. Transaksi: Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Dalam sistem ekonomi yang paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu transaksi halal dan haram.⁷ Dari definisi ini transaksi diartikan sebagai sebuah aktivitas pertukaran yang melibatkan minimal dua orang, dan termasuk di dalamnya adalah aktivitas jual beli.
3. Jual beli: dalam Islam, kata jual beli menjadi satu yaitu “al-bai” yang secara bahasa diartikan sebagai sebuah aktivitas memberikan sesuatu dikarenakan adanya imbalan sesuatu.⁸ Secara definitif, para ulama mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar

⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Transaksi Perbankan Syariah*, (Bandung: Zikrul Hakim), 2003, hlm. 10.

⁸ Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Juz I, (Semarang: Toha Putra), t.th, hlm. 239.

harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik.⁹

F. Kajian Pustaka

Kajian terbaru yang peneliti temukan tentang kajian praktik transaksi ekonomi masyarakat Banjar adalah hasil tulisan dari Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Tulisan tersebut dimuat dalam Jurnal Ahkam Volume XIV No. 2 Juli 2014. Dalam tulisan tersebut beliau mengkaji tentang perilaku ekonomi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Banjar, termasuk potensi sengketa yang terjadi di antara mereka dan bagaimana eksistensi pengembangan ekonomi Syariah di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam kajian tersebut disinggung juga sedikit tentang bagaimana orang Banjar berpegang kepada mazhab Syafi'i dalam perilaku ekonominya, terutama yang terkait dengan penggunaan shigat ijab dan kabul dalam transaksi jual beli. Namun ternyata dalam praktiknya dewasa ini, terjadi pergeseran. Orang Banjar yang sering berbelanja di mall atau swalayan ternyata tidak menggunakan shigat ijab dan kabul dalam transaksinya, dan hal ini dianggap sudah bergeser dari

⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni ala Mukhtasar al-Kharqy*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), t.th, hlm 239.

paradigma Syafi'iyah. Bertolak dari hal ini, maka rencana penelitian ini dilakukan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bagian terdahulu.